

RINGKASAN

Program kartu penderes merupakan salah satu inovasi yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2014. Adapun salah satu maksud dan tujuan dari kartu penderes adalah mempercepat birokrasi dalam pemberian santunan bagi para penderes yang mengalami kecelakaan kerja. Realitanya masih terdapat beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dilalui sehingga memperlambat proses pencairan. Seiring berjalannya program kartu penderes pemerintah menggandeng perusahaan untuk membantu pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Sebab sekarang ini mengalami kesulitan dalam memberikan bantuan langsung kepada para penderes. Sehingga adanya duplikasi kebijakan yakni kartu penderes dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebermanfaatan dan keberlanjutan dari program kartu penderes. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan adalah *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis interaktif oleh Miles Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program kartu penderes di Kabupaten Banyumas masih belum berjalan sesuai ketentuan, antarlain masih adanya berbagai persyaratan dan prosedur yang harus dilalui sehingga memperlambat proses pencairan santunan. Dilihat dari kebermanfaatannya program kartu penderes ini memiliki berbagai manfaat, antarlain adanya santunan bagi penderes yang mengalami kecelakaan serta sebagai identitas bagi para penderes. Meskipun sudah ada BPJS Ketenagakerjaan program kartu penderes masih berlanjut sampai sekarang dan untuk menghindari adanya duplikasi kebijakan dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka kepesertaan kartu penderes akan dialihkan secara bertahap ke BPJS Ketenagakerjaan.

Kata kunci : Evaluasi, Penderes, Kartu Penderes, BPJS Ketenagakerjaan

SUMMARY

The caller card program is one of the innovations issued by the government in 2014. One of the aims and objectives of the caller card is to speed up the bureaucracy in providing compensation to callers who experience work accidents. In reality, there are still a number of requirements and procedures that must be followed, thereby slowing down the disbursement process. As the push card program progresses, the government cooperates with companies to help pay for BPJS Employment. Because now it is experiencing difficulties in providing direct assistance to the tappers. So that there is a duplication of policies, namely the push card with BPJS Ketenagakerjaan.

This study aims to determine the benefits and sustainability of the pusher card program. By using a descriptive qualitative research method with a case study approach. The technique used in the selection of informants is *purposive sampling*. Collecting data using interviews, observation, and documentation. The analytical method used is interactive analysis by Miles Huberman.

The results of this study indicate that the taper card program in Banyumas Regency is still not running according to the provisions, among other things, there are still various requirements and procedures that must be followed, thereby slowing down the process of disbursing compensation. Judging from the usefulness of the caller card program, it has various benefits, including compensation for the caller who has an accident and as an identity for the caller. Even though there is BPJS Employment, the caller card program is still continuing today and to avoid duplication of policies with BPJS Employment, membership in the caller card will be transferred in stages to BPJS Employment.

Keywords : Evaluation, Penderes, Cards Penderes, Employment BPJS

